



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.102.923.224.126 (satu triliun seratus dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp186.256.486.556 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.289.179.710.682 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan daerah | | | |
| a. Semula | Rp | 1.102.923.224.126 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>61.439.554.760</u> | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp | | 1.164.362.778.886 |

| | | | |
|--|----|------------------------|------------------------|
| 2. Belanja Daerah | | | |
| a. Semula | Rp | 1.086.222.050.906 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>186.256.486.556</u> | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp | | 1.272.478.537.462 |
| 3. Pembiayaan daerah | | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | | |
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>124.816.931.796</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 124.816.931.796 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | | |
| 1) Semula | Rp | 16.701.173.220 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 16.701.173.220 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | | <u>108.115.758.576</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp | | 0 |

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 155.282.995.255
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.937.359.911
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 162.220.355.166
 - b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 947.515.794.871
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 54.513.755.279
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.002.029.550.150
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 124.434.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.560.430)
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 112.873.570
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 22.498.500.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.450.000.000
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 25.948.500.000
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 7.013.466.901
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 129.647.000
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.143.113.901
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 1) Semula Rp 16.241.028.354
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (68.244.729)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 16.172.783.625
 - d. Lain-lain PAD yang sah:
 - 1) Semula Rp 109.530.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.425.957.640
 - Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 112.955.957.640

- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
 - 1) Semula Rp 907.812.088.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 17.122.752.311
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 924.934.840.311
 - b. Transfer antar daerah;
 - 1) Semula Rp 39.703.706.871
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 37.391.002.968
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 77.094.709.839
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
 - 1) Semula Rp 124.434.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.937.430)
 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 109.496.570
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.377.000
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 3.377.000

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak hotel;
 - 1) Semula Rp 190.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pajak hotel setelah perubahan Rp 190.000.000
 - b. Pajak Restoran;
 - 1) Semula Rp 1.950.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 150.000.000
 Jumlah pajak restoran setelah perubahan Rp 2.100.000.000
 - c. Pajak hiburan;
 - 1) Semula Rp 13.500.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pajak hiburan setelah perubahan Rp 13.500.000
 - d. Pajak reklame:
 - 1) Semula Rp 260.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pajak reklame setelah perubahan Rp 260.000.000
 - e. Pajak penerangan jalan:
 - 1) Semula Rp 8.500.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.500.000.000
 Jumlah pajak penerangan jalan setelah perubahan Rp 10.000.000.000
 - f. Pajak parkir:
 - 1) Semula Rp 40.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pajak parkir setelah perubahan Rp 40.000.000

| | | | | |
|-----|--|----|----------------------|-------------------|
| g. | Pajak air tanah: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 25.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah pajak air tanah setelah perubahan | | | Rp 25.000.000 |
| h. | Pajak sarang burung walet: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 20.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah pajak sarang burung walet setelah perubahan | | | Rp 20.000.000 |
| i. | Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 300.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya setelah perubahan | | | Rp 300.000.000 |
| j. | Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 150.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya setelah perubahan | | | Rp 150.000.000 |
| k. | Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 8.700.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.300.000.000</u> | |
| | Jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setelah perubahan | | | Rp 10.000.000.000 |
| l. | Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: | | | |
| | 1) Semula | Rp | 2.500.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>500.000.000</u> | |
| | Jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah perubahan | | | Rp 3.000.000.000 |
| (2) | Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dari: | | | |
| a. | Retribusi jasa umum; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 4.079.516.360 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>129.647.000</u> | |
| | Jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan | | | Rp 4.209.163.360 |
| b. | Retribusi jasa usaha; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 2.631.950.541 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan | | | Rp 2.631.950.541 |
| c. | Retribusi perizinan tertentu; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 302.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| | Jumlah pajak hiburan setelah perubahan | | | Rp 302.000.000 |
| (3) | Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal atas BUMD dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| a | Semula | Rp | 16.241.028.354 | |
| b | Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(68.244.729)</u> | |
| | Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal atas BUMD setelah perubahan | | | Rp 16.172.783.625 |

(4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, bersumber dari:

| | | | | |
|----|--|----|-----------------|--------------------|
| a. | Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 1.298.150.393 | |
| | Jumlah hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan setelah perubahan | | | Rp 1.298.150.393 |
| b. | Jasa giro; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 2.500.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 | |
| | Jumlah jasa giro setelah perubahan | | | Rp 2.500.000.000 |
| c. | Pendapatan bunga; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.000.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (800.000.000) | |
| | Jumlah pendapatan bunga setelah perubahan | | | Rp 200.000.000 |
| d. | Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 2.629.098.400 | |
| | Jumlah penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan | | | Rp 2.629.098.400 |
| e. | Pendapatan denda pajak daerah; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 3.122.093 | |
| | Jumlah pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan | | | Rp 3.122.093 |
| f. | Pendapatan denda retribusi daerah; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 1.220.720 | |
| | Jumlah pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp 1.220.720 |
| g. | Pendapatan dari pengembalian daerah; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 294.366.034 | |
| | Jumlah pendapatan dari pengembalian daerah setelah perubahan | | | Rp 294.366.034 |
| h. | Pendapatan BLUD; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 106.030.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0 | |
| | Jumlah pendapatan BLUD setelah perubahan | | | Rp 106.030.000.000 |

Pasal 5

(1) Anggaran transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

| | | | | |
|----|---|----|-----------------|--------------------|
| a. | Dana perimbangan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 862.515.209.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.065.064.311 | |
| | Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | | Rp 866.580.273.311 |
| b. | Dana insentif daerah (DID); | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 11.649.633.000 | |
| | Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan | | | Rp 11.649.633.000 |

| | | | | |
|-----|---|----|----------------|-------------------|
| c. | Dana desa; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 45.296.879.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 1.408.055.000 | |
| | Jumlah dana desa setelah perubahan | | | Rp 46.704.934.000 |
| (2) | Anggaran transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dari: | | | |
| a. | Dana bagi hasil; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 33.425.479.671 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 37.391.002.968 | |
| | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 52.816.482.639 |
| b. | Bantuan keuangan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 6.278.227.200 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 18.000.000.000 | |
| | Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 24.278.227.200 |

Pasal 6

| | | | | |
|-----|---|----|--------------|----------------|
| (1) | Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| a. | Semula | Rp | 124.434.000 | |
| b. | Bertambah/(berkurang) | Rp | (14.937.430) | |
| | Jumlah pendapatan hibah dari pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp 109.496.570 |
| (2) | Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, bersumber dari lain-lain pendapatan dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| a. | Semula | Rp | 0 | |
| b. | Bertambah/(berkurang) | Rp | 3.377.000 | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan | | | Rp 3.377.000 |

Pasal 7

| | | | | |
|-----|---|----|-----------------|--------------------|
| (1) | Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas: | | | |
| a. | Belanja operasi | | | |
| | 1) Semula | Rp | 835.504.221.377 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 40.237.026.641 | |
| | Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | | Rp 875.741.248.018 |
| b. | Belanja modal | | | |
| | 1) Semula | Rp | 153.442.759.839 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 123.032.644.915 | |
| | Jumlah belanja modal setelah perubahan | | | Rp 276.475.404.754 |
| c. | Belanja tidak terduga | | | |
| | 1) Semula | Rp | 3.500.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 5.700.000.000 | |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 9.200.000.000 |
| d. | Belanja transfer | | | |
| | 1) Semula | Rp | 93.775.069.690 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 17.286.815.000 | |
| | Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | | Rp 111.061.884.690 |

(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp 526.555.734.058

2) Bertambah/(berkurang) Rp (60.440.588.017)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 466.115.146.041

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp 294.797.512.465

2) Bertambah/(berkurang) Rp 89.946.854.564

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 384.744.367.029

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp 8.409.124.242

2) Bertambah/(berkurang) Rp 80.119.704

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 8.489.243.946

d. Belanja hibah;

1) Semula Rp 5.741.850.612

2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.650.640.390

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 16.392.491.002

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp 100.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp (31.500.000)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 68.500.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp 31.029.278.424

2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.463.199.461

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 59.492.477.885

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp 47.722.038.003

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.942.900.647

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 63.664.938.650

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula Rp 74.230.461.412

2) Bertambah/(berkurang) Rp 76.542.859.807

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 150.773.321.219

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp 360.982.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.715.185.000

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.076.167.000

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 400.000.000

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 400.000.000

- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|----------------------|------------------|
| a. Semula | Rp | 3.500.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>5.700.000.000</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 9.200.000.000 |
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil; | | | |
| 1) Semula | Rp | 2.951.196.690 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>357.964.700</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 3.309.161.390 |
| b. Belanja bantuan keuangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 90.8230873.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.928.850.300</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 107.752.723.300 |

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- | | | | |
|---|----|-------------------------|--------------------|
| a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; | | | |
| 1) Semula | Rp | 362.052.374.919 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(27.376.685.824)</u> | |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan ASN setelah perubahan | | | Rp 334.675.689.095 |
| b. Belanja tambahan penghasilan ASN; | | | |
| 1) Semula | Rp | 59.840.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(34.135.397.553)</u> | |
| Jumlah belanja tambahan penghasilan ASN setelah perubahan | | | Rp 25.704.602.447 |
| c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; | | | |
| 1) Semula | Rp | 89.963.530.614 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.076.917.584</u> | |
| Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan | | | Rp 91.040.448.198 |
| d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD; | | | |
| 1) Semula | Rp | 12.970.103.204 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(575.849.378)</u> | |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan | | | Rp 12.394.253.826 |
| e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; | | | |
| 1) Semula | Rp | 376.425.321 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>27.456.000</u> | |
| Jumlah belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan | | | Rp 403.881.321 |
| f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; | | | |
| 1) Semula | Rp | 801.600.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan | | | Rp 801.600.000 |

- g. Belanja pegawai BLUD;
- | | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 551.700.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>542.971.154</u> | |
| Jumlah belanja pegawai BLUD setelah perubahan | | | Rp 1.094.671.154 |
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja barang;
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 53.821.886.757 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>38.916.899.838</u> | |
| Jumlah belanja barang setelah perubahan | | | Rp 92.738.786.595 |
- b. Belanja jasa;
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 88.152.515.701 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>13.880.804.994</u> | |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | | | Rp 102.033.320.695 |
- c. Belanja pemeliharaan;
- | | | | |
|---|----|----------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.630.272.026 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.641.899.380</u> | |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | | | Rp 6.272.171.406 |
- d. Belanja perjalanan dinas;
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 24.413.182.555 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>17.799.265.343</u> | |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | | | Rp 42.212.447.898 |
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- | | | | |
|---|----|------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.042.100.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.160.775.000)</u> | |
| Jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan | | | Rp 5.881.325.000 |
- f. Belanja barang dan jasa BOS;
- | | | | |
|--|----|--------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 21.416.280.600 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>292.701.260</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa BOS setelah perubahan | | | Rp 21.708.981.860 |
- g. Belanja barang dan jasa BLUD;
- | | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 973.321.274.826 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.576.058.749</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa BLUD setelah perubahan | | | Rp 113.897.333.575 |
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|-------------------|------------------|
| a. Semula | Rp | 8.409.124.242 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>80.119.704</u> | |
| Jumlah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) setelah perubahan | | | Rp 8.489.243.946 |
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

| | | | |
|----|---|----|----------------------|
| a. | Belanja hibah kepada pemerintah pusat; | | |
| | 1) Semula | Rp | 700.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>6.675.000.000</u> |
| | Jumlah belanja hibah kepada pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 7.375.000.000 |
| b. | Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; | | |
| | 1) Semula | Rp | 4.543.400.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.975.640.390</u> |
| | Jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia setelah perubahan | Rp | 8.519.040.390 |
| c. | Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; | | |
| | 1) Semula | Rp | 498.450.612 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> |
| | Jumlah belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik setelah perubahan | Rp | 498.450.612 |

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan belanja modal tanah persil, dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|----|---------------------|
| a. | Semula | Rp | 100.000.000 |
| b. | Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(31.500.000)</u> |
| | Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 68.500.000 |

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

| | | | |
|----|---|----|------------------------|
| a. | Belanja modal alat besar; | | |
| | 1) Semula | Rp | 130.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>117.500.000</u> |
| | Jumlah belanja modal alat besar setelah perubahan | Rp | 247.500.000 |
| b. | Belanja modal alat angkutan; | | |
| | 1) Semula | Rp | 2.020.217.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>250.000.000</u> |
| | Jumlah belanja modal alat angkutan setelah perubahan | Rp | 2.270.217.000 |
| c. | Belanja modal alat bengkel dan alat ukur; | | |
| | 1) Semula | Rp | 200.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>131.000.000</u> |
| | Jumlah belanja modal alat bengkel dan alat ukur setelah perubahan | Rp | 331.000.000 |
| d. | Belanja modal alat pertanian; | | |
| | 1) Semula | Rp | 2.625.240.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.361.140.000)</u> |
| | Jumlah belanja modal alat pertanian setelah perubahan | Rp | 264.100.000 |

| | | | | |
|----|---|----|-----------------------|----------------|
| e. | Belanja modal alat kantor dan rumah tangga; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 5.982.947.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>17.389.233.410</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga setelah perubahan | Rp | | 23.372.180.410 |
| f. | Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 35.998.850 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>106.500.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar setelah perubahan | Rp | | 142.498.850 |
| g. | Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 7.278.866.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>176.921.931</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan setelah perubahan | Rp | | 7.455.487.931 |
| h. | Belanja modal alat laboratorium; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 650.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.902.096.680</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat laboratorium setelah perubahan | Rp | | 2.552.096.680 |
| i. | Belanja modal komputer; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.445.937.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>8.781.214.673</u> | |
| | Jumlah belanja modal komputer setelah perubahan | Rp | | 10.227.151.673 |
| j. | Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 65.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>25.000.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian setelah perubahan | Rp | | 90.000.000 |
| k. | Belanja modal alat peraga; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.800.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.800.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat peraga setelah perubahan | Rp | | 3.600.000 |
| l. | Belanja modal alat peralatan proses/produksi; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>13.000.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal alat peralatan proses/produksi setelah perubahan | Rp | | 13.000.000 |
| m. | Belanja modal rambu-rambu; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 20.800.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>383.700.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal rambu-rambu setelah perubahan | Rp | | 404.500.000 |
| n. | Belanja modal peralatan olahraga; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 9.290.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.710.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal peralatan olahraga setelah perubahan | Rp | | 13.000.000 |

| | | | | |
|-----|--|----|-----------------------|-----------------|
| o. | Belanja modal peralatan dan mesin BOS; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 5.105.157.400 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(146.381.175)</u> | |
| | Jumlah belanja modal peralatan dan mesin BOS setelah perubahan | Rp | | 4.959.776.225 |
| p. | Belanja modal peralatan dan mesin BLUD; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 5.457.025.174 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.689.343.942</u> | |
| | Jumlah belanja modal peralatan dan mesin BLUD setelah perubahan | Rp | | 7.146.369.116 |
| (3) | Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri atas: | | | |
| a. | Belanja modal bangunan gedung; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 45.885.038.003 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>13.780.605.647</u> | |
| | Jumlah belanja modal bangunan gedung setelah perubahan | Rp | | 59.665.643.650 |
| b. | Belanja modal tugu titik control/pasti; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 337.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.013.000.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal tugu titik control/pasti setelah perubahan | Rp | | 2.350.000.000 |
| c. | Belanja modal gedung dan bangunan BLUD; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 1.500.000.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>149.295.000</u> | |
| | Jumlah belanja modal gedung dan bangunan BLUD setelah perubahan | Rp | | 1.649.295.000 |
| (4) | Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, terdiri atas: | | | |
| a. | Belanja modal jalan dan jembatan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 53.873.426.412 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>70.345.292.961</u> | |
| | Jumlah belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan | Rp | | 124.218.719.373 |
| b. | Belanja modal bangunan air; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 19.254.685.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.617.214.370</u> | |
| | Jumlah belanja modal bangunan air setelah perubahan | Rp | | 22.871.899.370 |
| c. | Belanja modal instalasi; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 102.350.000 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>113.750.277</u> | |
| | Jumlah belanja modal instalasi setelah perubahan | Rp | | 216.100.277 |
| d. | Belanja modal jaringan; | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>66.602.199</u> | |
| | Jumlah belanja modal jaringan setelah perubahan | Rp | | 66.602.199 |

- e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD;
- | | | | |
|--|----|----------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.400.000.000</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD setelah perubahan | | | Rp 3.400.000.000 |
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
- | | | | |
|---|----|----------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.205.800.000</u> | |
| Jumlah belanja modal bahan perpustakaan setelah perubahan | | | Rp 1.205.800.000 |
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
- | | | | |
|---|----|--------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 90.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>600.000.000</u> | |
| Jumlah belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga setelah perubahan | | | Rp 690.000.000 |
- c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- | | | | |
|---|----|--------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 70.982.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>103.385.000</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya BOS setelah perubahan | | | Rp 180.367.000 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- | | | | |
|--|----|----------------------|------|
| 1) Semula | Rp | 200.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(200.000.000)</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya BLUD setelah perubahan | | | Rp 0 |
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f merupakan belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|--------------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 0 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>400.000.000</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp 400.000.000 |

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|--|----|----------------------|------------------|
| a. Semula | Rp | 3.500.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>5.700.000.000</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 9.200.000.000 |

Pasal 11

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;
- | | | | |
|--|----|--------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.249.850.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>345.000.000</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa setelah perubahan | | | Rp 2.594.850.000 |

- b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 701.346.690 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>12.964.700</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa setelah perubahan | | | Rp 714.311.390 |
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp | 90.823.873.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.928.850.300</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa setelah perubahan | | | Rp 107.752.723.300 |

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp | 0 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>124.816.931.796</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | | Rp 124.816.931.796 |
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 16.701.173.220 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | | Rp 16.701.173.220 |

Pasal 13

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:
- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- | | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>15.939.541.003</u> | |
| Jumlah pelampauan penerimaan pendapatan transfer setelah perubahan | | | Rp 15.939.541.003 |
- b. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>42.419.003.471</u> | |
| Jumlah Pelampauan penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 42.419.003.471 |
- c. Pengehematan Belanja;
- | | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>43.045.936.327</u> | |
| Jumlah penghematan belanja setelah perubahan | | | Rp 43.045.936.327 |
- d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;

| | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.254.782.150</u> | |
| Jumlah sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 2.254.782.150 |
| e. Sisa belanja lainnya; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>21.157.668.845</u> | |
| Jumlah sisa belanja lainnya setelah perubahan | | | Rp 21.157.668.845 |
| (2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dengan rincian sebagai berikut: | | | |
| a. Semula | Rp | 16.701.173.220 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) setelah perubahan | | | Rp 16.701.173.220 |

Pasal 14

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 15

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 64
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

